

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Neraca Pendidikan**

###### **a. Pengertian Neraca Pendidikan**

Dalam terminologi, keuangan “Neraca” menggambarkan laporan keuangan dari sebuah intensitas dalam periode tertentu. Menurut Kasmir (2012 hlm. 30), “Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan”. Neraca akan menggambarkan posisi keseimbangan antara input dan output dari proses.

Menurut NPD (2016), “neraca pendidikan merupakan platform informasi potret kinerja pendidikan di daerah”. Adapun menurut Kemendikbud (Feb 4, 2018), “neraca pendidikan dapat dijadikan kaca pembesar atau platform informasi potret kinerja pendidikan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi pendidikan daerah, data acuan untuk menentukan kebijakan pemerintah daerah, sarana sosialisasi yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan”.

Dalam hasil kerja PASKA (2018) “neraca pendidikan akan menjadi potret dalam menjelaskan suatu situasi dan kondisi pendidikan disuatu daerah, yang di dalamnya melingkupi Penganggaran, Guru, Fasilitas, Ujian Nasional, dan seluruh aspek yang terdapat pada aktifitas pendidikan”.

###### **b. Komponen Neraca Pendidikan**

Terdapat 4 komponen yang ada didalam Neraca Pendidikan, yaitu:

- 1) Input, yang meliputi jumlah siswa, jumlah guru, dan jumlah sekolah. Intervensi, yang meliputi APBD, anggaran pendidikan, dan dana transfer daerah.
- 2) Output, yang meliputi rerata hasil Ujian Nasional (UNBK- dan non UNBK), Indeks integritas Ujian Nasional (UNBK dan non UNBK), pelaksanaan UNBK per jenjang, Skor AKSI, kualifikasi guru, guru menurut usia, Guru Garis Depan (GGD), program keahlian ganda, akreditasi S-M dan PNF, kondisi ruang kelas,

Sekolah pelaksana PPK, sekolah piloting vokasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan siswa peraih medali olimpiade, tingkat nasional/internasional.

- 3) Informasi penunjang lainnya yang meliputi peta dan data administrasi wilayah, isu-isu strategis pendidikan, nama, alamat dan nomor kontak instansi terkait penyelenggaraan di daerah dimaksud, dan kalender tahunan.

c. Informasi yang dapat diperoleh dalam Neraca Pendidikan

Informasi yang ditampilkan dalam Neraca Pendidikan, yaitu:

- 1) Anggaran pendidikan daerah yang meliputi total APBD, jumlah dan persentase alokasi anggaran pendidikan (menurut urusan) dalam APBD, Dana Daerah, Transfer Daerah dari APBN (ke Provinsi dalam bentuk BOS dan ke Kab/Kota dalam bentuk DAU gaji, DAK, Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan).
- 2) Guru yang meliputi jumlah guru, persentase guru yang sudah dan belum kualifikasi D4/S1, persentase guru yang sudah menerima sertifikasi profesi, rerata hasil UKG per jenjang pendidikan, dan perbandingan rerata hasil UKG antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
- 3) Siswa yang meliputi jumlah siswa, persentase anak bersekolah menurut Angka Partisipasi Murni (APM), rerata hasil UN per jenjang pendidikan, perbandingan rerata hasil UN per jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, dan perbandingan rerata IIUN di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
- 4) Satuan pendidikan yang meliputi jumlah satuan pendidikan, kondisi sarana dan prasarana ruang kelas dan ruang penunjang perjenjang pendidikan, dan persentase sekolah yang berakreditasi A, B, C dan belum terakreditasi.
- 5) Ketunaaksaraan yang meliputi jumlah dan persentase penduduk tuna aksara, dan perbandingan persentase penduduk tuna aksara antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
- 6) IPM yang meliputi rerata Angka Harapan Lama Sekolah, angka Rerata Angka Lama Sekolah, serta perbandingan dan ranking skor IPM antar-Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

d. Manfaat Neraca Pendidikan

Dalam Kemendikbud (2018), Neraca Pendidikan mempunyai manfaat baik bagi pemerintah dan juga masyarakat. Adapun manfaat dari Neraca Pendidikan, yaitu:

- 1) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah.
- 2) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk melaksanakan desntralisasi pendidikan.
- 3) Menerapkan sistem pembayaran Pendidikan berbasis kinerja pada semua jenjang pemerintahan termasuk penerapan desentralisasi sistemtris untuk bidang pendidikan.
- 4) Mendorong pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
- 5) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dibidang pendidikan.
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi pendidikan.
- 7) Memperkuat ekosistem pendidikan melalui strategi antara pemerintah, pelaku dan pegiat pendidikan, media, orangtua, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Menurut Kemendikbud (2018), “neraca ini dimaksudkan untuk terwujudnya keseimbangan anggaran dan kualitas pendidikan di daerah dalam rangka melaksanakan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa”.

#### e. Dampak Neraca Pendidikan

Menurut Kemendikbud (2016), “neraca pendidikan memiliki dampak yang positif dan juga dampak negatif”. Dampak positif dari neraca pendidikan ini dapat memberikan transparansi informasi mengenai data pendidikan setiap daerahnya. Sedangkan dampak negatif neraca pendidikan, keterbukaannya informasi kepada seluruh masyarakat menjadikan aib terhadap kelemahan kemajuan pendidikan.

#### f. Langkah-langkah membuka Neraca Pendidikan

Menurut Kemenidkbud (2018), “data dan informasi yang tercantum dalam neraca pendidikan akan memiliki nilai manfaat tinggi bila ditindak lanjuti dengan komunikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat”. Dalam versi online, neraca pendidikan dapat diperoleh dengan mengakses laman web <http://npd.data.kemdikbud.go.id> untuk

semua Provinsi/Kabupaten/Kota. Langkah-langkah membuka neraca pendidikan diantaranya:

1. Buka *google*, lalu dapat mengaksesnya dihalam *web* dengan cara mengetikan neraca pendidikan atau dengan <http://npd.data.kemdikbud.go.id>.

## APLIKASI NPD HTTP://NPD.KEMDIKBUD.GO.ID/

*Sumber: [https://www.youtube.com/watch?v=g6UR\\_xzfJrE](https://www.youtube.com/watch?v=g6UR_xzfJrE)*

2. Setelah itu akan muncul halaman utama, yang menjelaskan tentang neraca pendidikan.



*Sumber: [https://www.youtube.com/watch?v=g6UR\\_xzfJrE](https://www.youtube.com/watch?v=g6UR_xzfJrE)*

3. Lalu kita dapat mengaksesnya sesuai dengan kebutuhan atau memilih data apa yang ingin dilihat. Seperti anggaran, jumlah kondisi kelas, akreditasi, jumlah peserta murid dan guru, hasil ujian nasional, penduduk tuna aksara dan IPM.



Dalam penyelenggaraan pendidikan keuangan dan pembiayaan tidak bisa terlepas dari manajemen pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur tentang alokasi anggaran pendidikan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011 menyatakan bahwa, “anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga”. Dalam pasal 1 butir 48 menyebutkan, “alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Pada UU 1945 Pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa, “anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD”. Hal ini sejalan dengan UU No 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 yang berbunyi, “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

#### b. Manfaat anggaran

Menurut M. Nafarin (2012, hlm. 20), manfaat anggaran antara lain:

- 1) Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama
- 2) Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan
- 3) Dapat memotivasi karyawan
- 4) Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan
- 5) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
- 6) Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin
- 7) Alat pendidikan bagi para manajer

Dapat disimpulkan bahwa anggaran mentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya, selain itu anggaran juga memiliki manfaat sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam perusahaan karena

dengan menggunakan anggaran maka perusahaan dapat merencanakan masa depan perusahaan.

## 2. Kinerja Instansi

### a. Pengertian Kinerja

Menurut Moeherianto (2012, hlm. 69) menyebutkan bahwa, “kinerja berasal dari kata *job performance* dan *actual performance* yang artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah di capai oleh seseorang karyawan”. Moeherianto (2010, hlm. 11), dalam bukunya menyebutkan bahwa:

Kinerja karyawan sebagai hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam situasi organisasi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan baik secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai moral ataupun etika.

Menurut Edy Sutrisno (2010, hlm. 170-172), dalam bukunya mengutip pengertian kinerja dari beberapa ahli:

- 1) Lawler (1967) mendefinisikan, “kinerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas”.
- 2) Prawirosentono (1999) mengemukakan, “kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang, sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.
- 3) Minner (1990) menyebutkan, “kinerja adalah bagian seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepadanya”.
- 4) Irianto (2001) mendefinisikan, “kinerja karyawan adalah prestasi yang di peroleh seseorang dalam melakukan tugas”.
- 5) McCormick & Tiffin (1980) mendefinisikan, “kinerja adalah kuantitas, dan waktu yang di gunakan dalam menjalankan tugas, aktukerja adalah jumlah absen, keterlambatan dan lamanya masa kerja”.

Dapat disimpulkan bahwa, “kinerja sebagai hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah

di tetapkan oleh organisasi” (Edy Sutrisno, 2010, hlm. 170-172). Sedangkan menurut Bastian (2010, hlm. 274), “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi”. Dalam PP NO. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 35 menyatakan bahwa, “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”.

Menurut Mahsun (2012 hlm. 25) mengatakan bahwa, “kinerja (*performance*) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu program, kegiatan dan kebijakandalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi”.

Adapun menurut MenPAN (2007), “kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan”.

Sejalan dengan paparan diatas, Dinas Pendidikan kota Bandung memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang berada dalam peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang, petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu laporan kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja. Dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang, Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah harus berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 28 Tahun 1999 tentang, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memepertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. oleh sebab itu untuk mencapai akuntabilitas Instansi pemerintah yang baik, Dinas pendidikan kota Bandung dituntut untuk melakukan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi Dinas pendidikan kota Bandung sebagai sub sistem dari pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Dimanjuntak (2010, hlm. 11), ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja, diantaranya:

1) Kompensasi individu

Kompensasi individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja. Terdapat enam golongan yaitu kemampuan dan keterampilan kerja, keahlian, kebutuhan, tanggung jawab, latar belakang dan etos kerja.

2) Dukungan organisasi dan manajemen

Setiap pekerja tergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana kerja, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat kerja. Pengorganisasian yang dimaksud untuk memberi kejelasan bagi setiap unit kerja bagi setiap sasaran tersebut, sedangkan penyediaan sarana dan prasarana kerja dapat menunjang kinerja setiap orang, dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam sistem teknologi yang canggih dapat memudahkan, dan memberikan kenyamanan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dengan baik.

3) Faktor psikologis

Kinerja perusahaan dan kinerja setiap perorangan juga sangat tergantung pada kemampuan psikologis seperti persepsi, sikap dan motivasi.

Menurut Mangunegara (2010, hlm. 14) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kinerja, diantaranya:

- 1) Faktor individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, demografi.
- 2) Faktor psikologis, terdiri dari persepsi *attitude* atau sikap, *personality*, pembelajaran, motivasi.
- 3) Faktor organisasi, terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur *job design*.

Sedangkan menurut Mangkunegara (2016, hlm. 67) mengatakan bahwa, ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja diantaranya:

1) Faktor kemampuan

Kemampuan *ability* pegawai mempunyai kemampuan *IQ* (110-120) diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai dan terampil dalam mengerjakan tugasnya.

2) Faktor motivasi

Motivasi berbentuk *attitude* atau sikap seseorang pegawai dalam menghadapi situasi, motivasi merupakan kondisi menggerakkan pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun faktor kinerja pegawai dinas pendidikan menurut sub. Bagian umum dan kepegawain, sebagai berikut:

- 1) Inisiatif
- 2) Bertanggung jawab
- 3) Disiplin
- 4) Kerjasama
- 5) Penempatan pegawai yang sesuai

c. Penilaian dan pengukuran kinerja

Menurut Sedarmayanti, (2010, hlm. 261) menjelaskan bahwa, “penilaian kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa/mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang”. Menurut Dessler (2009, hlm. 132), “penilaian kinerja sebagai evaluasi kinerja karyawan saat ini/atau dimasa lalu relatif terhadap standar prestasinya.

Adapun menurut Adisty (2013, hlm. 2) berpendapat bahwa:

Perusahaan penting untuk mengetahui kinerja karyawan agar dapat mengambil langkah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaannya dengan langkah mengikut sertakan karyawan ke pelatihan-pelatihn tertentu faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan diantaranya adalah bagaimana kondisi fisik tempat bekerj, pertan dan materi, waktu untuk bekerja pengawasan dan pelatuhan, desain organisasi dan iklim organisasi.

Menurut Mahsun (2012, hlm. 26-28) menjelaskan terdapat empat elemen pokok pengukuran kinerja, antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja

3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja

Berdasarkan Penetapan No.25 Tahun 2012, “pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah”. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian *assessment* yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Sesuai dengan paparan di atas, untuk mengetahui tingkat kinerja suatu perusahaan maka harus dilakukan evaluasi pada penilaian atas hasil usaha yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi perusahaan pada periode waktu tertentu. Menurut Nurfitriana (2016, hlm. 30) menjelaskan bahwa:

Penilaian kinerja dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek keuangan dan non keuangan dimana kinerja keuangan diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan yang dimulai secara kuantitatif dalam bentuk uang dilihat dari segi pengelolaannya, penggerakannya, maupun tujuannya. Sehingga dapat dilihat baik buruknya perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut capaian kinerja dinas pendidikan dapat dilihat dari bagaimana realisasi anggaran yang diberikan pemerintah dalam mendanai urusan pendidikan. Menurut Darise (2010, hlm. 146) menjelaskan bahwa, “penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut”.

#### d. Indikator kinerja

Menurut Setiawan (2014, hlm. 147), dalam mengukur kinerja dapat menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Ketetapan penyelesaian tugas  
Pengelolaan waktu dalam bekerja dan ketetapan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.
- 2) Keseuaian jam kerja

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

3) Tingkat kehadiran

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

4) Kerjasama antar karyawan

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

5) Kepuasan kerja

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mengukur dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menetapkan indikator kinerja. Sesuai dengan surat keputusan kepala dinas pendidikan kota Bandung Nomor: 800/331-Disdik/2014 tentang penerapan indikator kinerja Dinas pendidikan kota Bandung. Adapun indikator kinerja Instansi Dinas pendidikan kota Bandung yang bertujuan untuk:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk perbaikan kinerja.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja
1	Tersedia dan terjangkau akses pendidikan bagi anak usia dini dan usia sekolah secara berkeadilan.	APK dan APM Paud-SMA
2	Tersedia dan terjangkau akses pendidikan bagi remaja dan orang dewasa putus sekolah	Angka melek huruf (AMH), Angka rata-rata lama sekolah (RLS), Rasio ketersediaan satuan PNF dan sasaran.

3	Tersedianya layanan pendidikan sekolah yang bermutu dan berwawasan lingkungan.	Prosentase SPM dan APM
4	Meningkatnya efektifitas dan relevansi layanan pendidikan.	Angka putus sekolah, angka kelulusan, dan angka melanjutkan sekolah
5	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu.	Guru yang memiliki kualifikasi S-1, S-2 dan hasil uji kompetensi guru
6	Tersedianya lulusan pendidikan kejuruan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja.	SMK yang bekerjasama dengan dunia Industri dan dunia Usaha, pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industry kreatif dan lulusan kursus dan berkerja berwirausaha.
7	Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin Terselenggaranya Layanan prima.	Indeks kepuasan masyarakat.

*Sumber: Dinas pendidikan kota Bandung, data diolah*

Adapun indikator kinerja mengenai anggaran pendidikan Sesuai dengan surat keputusan kepala dinas pendidikan kota Bandung Nomor: 800/331-Disdik/2014, diataranya:

- 1) DAK Fisik
- 2) TPG
- 3) Tamsil
- 4) Tunjangan khusus guru
- 5) DAU (Gaji GTK PNSD)
- 6) BOP PAUD

Dari penjelasan tersebut bahwa indikator dalam pengukuran kinerja sangatlah penting dalam menilai capaian tujuan organisasi yang dilihat dari tujuan, sasaran dan strategi.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul	Subjek Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Musdalifah, supriadi torro (2017)	Analisis dampak neraca pendidikan terhadap kinerja Dinas pendidikan kabupaten Barru 2015-2017	Sarana dan Prasarana	Diketahui bahwa dampak positif yang diperoleh pada neraca pendidikan dari tahun 2015-2017 dan APK dan APM kabupaten Barru dari tahun 2016-2017 sebesar 90,7% untuk jenjang SD/Sederajat, 76,8% untuk jenjang SMP 76,8% dan jenjang SMA/Sederajat 69,8%. Dampak positif dari neraca pendidikan adalah Dinas pendidikan selalu up to date	Terdapat perbedaan mengenai subjek penelitian.	Dalam penelitian ini mengukur sejauh mana kinerja dinas pendidikan melalui neraca pendidikan.

				<p>dalam membuat perencanaan dan mengalokasikan anggaran tepat sasaran dan juga dari indeks pembangunan manusia yang meningkat ditunjang dengan sarana dan fasilitas yang cukup memadai dengan rasio pendidikan yang meningkat dan juga kualitas guru yang memiliki pendidikan yang berjenjang tinggi sehingga sumber daya manusia di Kabupaten Barru sudah berjalan dengan baik ditunjang dengann fasilitas yang cukup memadai.</p>		
<b>2</b>	Aksara Nindia (2019)	Transparansi alokasi anggaran melalui neraca pendidikan	Transparansi alokasi anggaran	Dalam kesimpulannya bahwa neraca Pendidikan diharapkan dapat menggambarkan	Trasnparansi	Mengukur sejauh mana peran pemerintah

			<p>capaian pendidikan di masing-masing daerah yang dapat diukur sehingga mendorong walikota dan bupati untuk mengedepankan pembangunan pendidikan di daerahnya, serta dengan adanya transparansi alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat mengembalikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, sehingga transparansi sangat penting untuk keberlanjutan alokasi anggaran pendidikan supaya tidak ada celah korupsi dan menjawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan dari</p>	<p>pendidikan menggunakan anggaran pendidikan dengan menggunakan neraca pendidikan.</p>
--	--	--	--	---

				masyarakat bahwa uang pemerintah dialokasikan ke pendidikan untuk apa saja dan akan terbangun interaksi sekolah dengan dinas pendidikan serta orangtua dengan dinas setempat		
3	Herawati (2011)	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi.	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kota Jambi	Menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Di Kota Jambi mempunyai pengaruh positif signifikan.	Tidak menggunakan neraca pendidikan dan sistem kinerja bukan dalam pendidikan.	Sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.
4	Dinas pendidikan kota Bandung (2014)	Laporan kinerja instansi Dinas	Capain kinerja	Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja	Tidak menggunakan	Kinerja instansi dinas pendidikan kota bandung.

		pendidikan kota Bandung		Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2014 adalah sebesar 95.56%. Dari sebanyak 65 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dengan rincian sebanyak 38 Indikator Kinerja (73.08%) capaian kinerjanya sangat tinggi, 8 Indikator Kinerja (15.38%) capaian kinerjanya tinggi, 2 Indikator Kinerja (3.85%) capaian kinerjanya sedang, 4 Indikator Kinerja(7.69%) capaian kinerjanya rendah, dan tidak	neraca pendidikan.	
--	--	-------------------------	--	--	--------------------	--

				terdapat Indikator Kinerja (0%) yang capaian kinerjanya sangat rendah.		
--	--	--	--	--	--	--

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian studi pustaka yang telah penulis lakukan, neraca pendidikan dapat memberikan laporan atau gambaran mengenai aktivitas pendidikan. Maka neraca pendidikan dapat mempengaruhi kinerja dinas pendidikan. Sejalan dengan harapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin meningkatkan partisipasi daerah atau kinerja pendidikan di setiap daerah dalam hal anggaran pendidikan melalui Neraca Pendidikan. Menurut Disdik (2020), “Dinas pendidikan merupakan salah satu Lembaga Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang memfasilitasi masyarakat untuk para generasi muda dan sekolah-sekolah dari mulai PAUD, SD, SMP sampai SMA serta SMK agar mendapatkan haknya berupa pelayanan pendidikan maupun non pendidikan serta membentuk generasi bangsa yang cerdas dan mampu menghadapi tuntutan di masa yang akan datang”.

Menurut MenPAN (2007), “Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan”.

Dalam pidato Presiden Republik Indonesia (2019) “pemerintah telah manganggarkan biaya pendidikan cukup besar namun pada kenyataannya masih banyak perbedaan dari kualitas pendidikan yang ada dipedasaan dengan yang ada di kota”. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada kinerja Dinas pendidikan. Untuk mengukur kinerja pemerintah mengenai suatu sistem yang telah dibentuk, perlu adanya akuntabilitas supaya dalam pengelolaan tidak terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, dan tidak adanya ketidak jelasan arah dalam pembangunan, khususnya dalam masalah anggaran. Menurut Mahanani (2010) “anggaran merupakan suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun”. Sedangkan anggaran pendidikan menurut UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011 menyatakan bahwa, “anggaran pendidikan

adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga”.

Pada UU 1945 Pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa, “anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD”. Hal ini sejalan dengan UU No 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 yang berbunyi, “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Namun hal ini pula tidak terlepas kaitannya dengan sektor pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan kota itu sendiri dalam hal merencanakan dan memberikan anggaran untuk dana pendidikan. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disusun secara sistematis untuk suatu periode tertentu. Adanya tuntutan masyarakat yang dikelola pemerintah menyebabkan perlunya pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mewajibkan suatu standar akuntansi pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah menetapkan bahwa laporan keuangan laporan disusun sebagai laporan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri atas realisasi anggaran, realisasi anggaran suatu serangkaian anggaran yang dikelola. Didalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, Dinas Pendidikan kota Bandung memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang berada dalam peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang, petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv laporan kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja. Dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang, Sistem Akuntabilitas

Kinerja instansi pemerintah harus berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 28 Tahun 1999 tentang, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

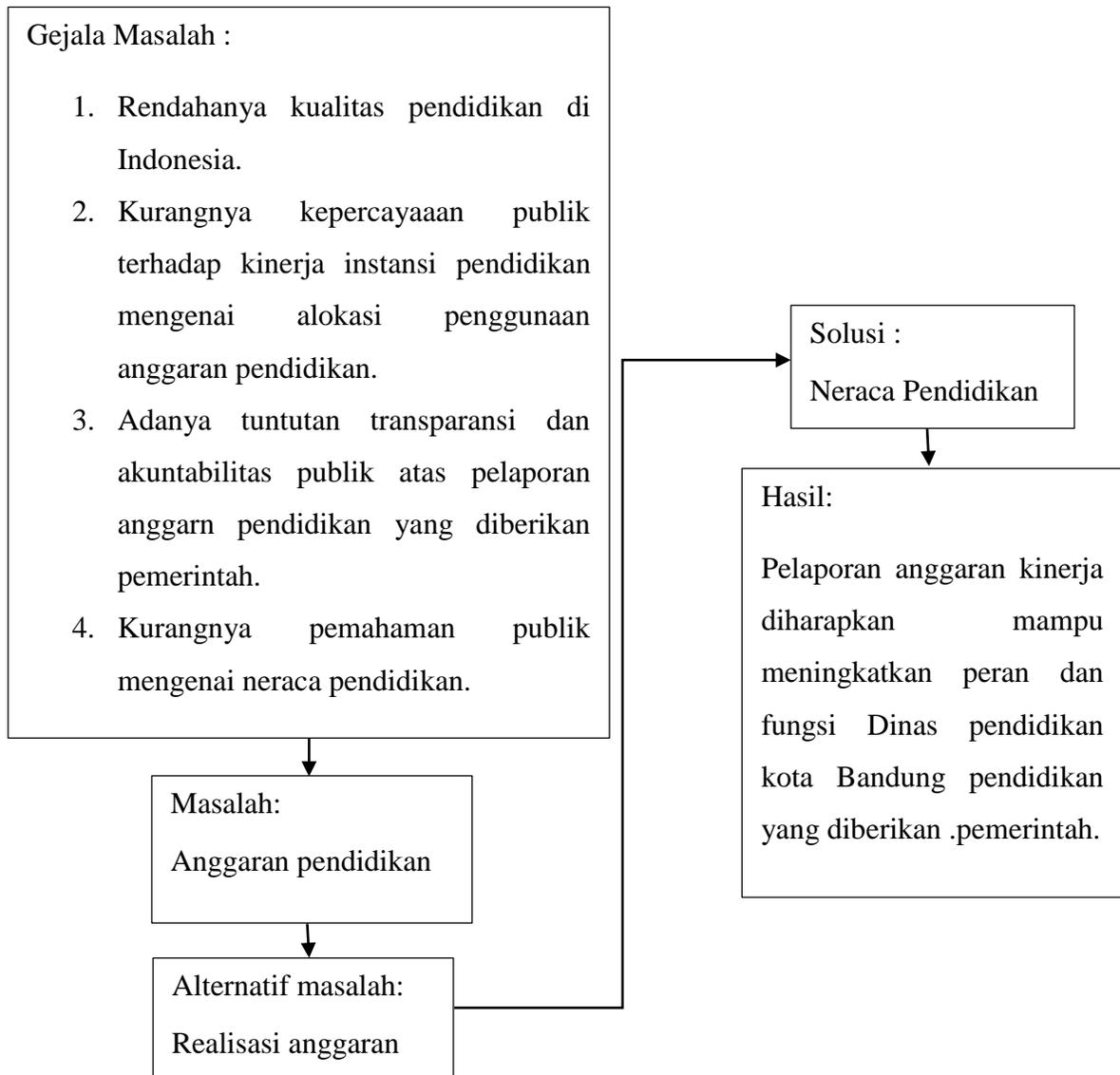
Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja berguna untuk mencapai hasil kerja yang meningkat dan perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan dapat digunakan sebaik mungkin. penganggaran yang dilakukan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.

Oleh sebab itu, untuk mengathui gambaran kinerja instasi pendidikan mengenai anggaran pendidikan yang diberikan oleh pusat ke daerah dapat dilihat dari neraca pendidikan. Menurut Neraca Pendidikan Daerah (2016) “neraca pendidikan merupakan platform informasi potret kinerja pendidikan didaerah”. Adapun menurut Kemendikbud (Feb 4, 2018) “Neraca pendidikan dapat dijadikan kaca pembesar atau platfrom informasi potret kinerja pendidikan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi pendidikan daerah, data acuan untuk menentukan kebijakan pemerintah daerah, sarana sosialisasi yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan”.

Berdasarkan Neraca Pendidikan (2016) “melalui neraca pendidikan tentu dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kinerja dinas pendidikan, seperti merencanakan kegiatan pendidikan yang ada di setiap daerahnya, memperkuat ekosistem pendidikan dalam meningkatkan mutu/kualitas dan akses pendidikan, dapat melihat berapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendidikan, mengetahui rincian alokasi anggaran sekaligus pemanfaatan anggaran pendidikan yang dikirimkan ke setiap daerah melalui dana transfer daerah”.

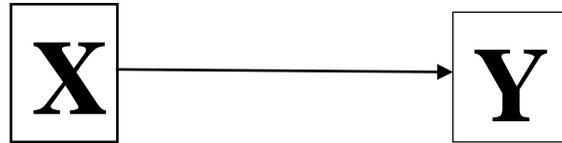
Pelaporan anggaran kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi Dinas pendidikan kota Bandung sebagai sub sistem dari pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dinas pendidikan kota Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun kerangka pemikiran yang dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan paparan tersebut, dalam penelitian ini hubungan antar variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2

Hubungan antar variabel penelitian

Ket :

X : Variabel Bebas (Neraca Pendidikan)

Y : Variabel Terkait (Kinerja Dinas Pendidikan)

→ : Dampak

#### D. Asumsi dan Hipotesis

##### 1. Asumsi

Dalam buku panduan penulisan KTI FKIP Unpas (2020, hlm.22), “asumsi merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima peneliti, yang dimana asumsi berfungsi sebagai landasan bagi perumusan hipotesis”. Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa semakin besar anggaran yang diberikan untuk realisasi anggaran pendidikan maka semakin tinggi tingkat kinerja Dinas pendidikan kota Bandung dalam memberikan dana pendidikan kepada sekolah-sekolah yang ada di kota Bandung.

##### 2. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018, hlm. 63), “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

$H_0 : \rho_{xy} = 0$  = Tidak terdapat pengaruh antara dampak neraca pendidikan terhadap kinerja dinas pendidikan di kota Bandung.

$H_a : \rho_{xy} \neq 0$  = Terdapat pengaruh antara dampak neraca pendidikan terhadap kinerja dinas pendidikan di kota Bandung.